BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum/Profil Obyek Peneitian

4.1.1 Sejarah Kabupaten Jepara

Jepara berasal dari perkataan Ujung Para, Ujung Mara, dan Jumparayang kemudian menjadi Jepara, yang berarti sebuah tempat permukiman para pedagang yang berniaga ke berbagai daerah. Menurut buku "Sejarah Baru Dinasti Tang (618-906M)" mencatat bahwa pada tahun 674 seorang musafir Tionghoa bernama I-Tsing pernah mengunjungi negeri Holing atau Kaling atau Kalingga yang juga di sebut Jawa atau Japa dan diyakini berlokasi di Keling, kawasan timur Jepara sekarang ini, serta dipimpin oleh seorang yang bernama Ratu Shima yang dikenal sangat tegas.

Pada Abad ke-XV (1470 M) Jepara mulai dikenal sebagai bandar perdagangan yang kecil yang baru dihunioleh 90-100 orang dan dipimping oleh Aryo Timur dan berada di bawah pemerintahan Kerajaan Demak, Kemudian Aryo Timur digantikan oleh putranya yang bernama Pati Unus pada tahun 1507-1521. Pati Unus dikenal sangat gigih melawan penjajahan Portugis di Malaka yang menjadi mata rantai perdagangan nusantara. Setelah Pati Unus wafat digantikan oleh ipar Faletehan /Fatahillah yang berkuasa pada tahun 1521-1536. Kemudian pada tahun 1536 oleh penguasa Demak yaitu Sultan Trenggono, Jepara

diserahkan kepada anak dan menantunya yaitu Ratu Retno Kencono dan Pangeran Hadirin, suaminya.

Setelah tewasnya Sultan Trenggono dalam Ekspedisi Militer di Panarukan Jawa Timur pada tahun 1546,lalu terjadilah perebutan tahta kerajaan Demak yang berakhir dengan tewasnya Pangeran Hadiri yang di bunuh oleh Aryo Penangsang pada tahun 1549.

Kematian orang-orang yang dikasihi membuat Ratu Retno Kencono sangat berduka dan beliau meninggalkan kehidupan istana untuk bertapa di bukit Danaraja. Setelah terbunuhnya Aryo Penangsang oleh Sutowijoyo, Ratu Retno Kencono bersedia turun dari pertapaan dan dilantik menjadi penguasa Jepara dengan gelar NIMAS RATU KALINYAMAT.

Masa pemerintahan Ratu Kalinyamat Pada tahun (1549-1579), Jepara berkembang pesat menjadi Bandar Niaga utama di Pulau Jawa, yang melayani eksport import. Disamping itu juga menjadi Pangkalan Angkatan Laut yang telah dirintis sejak masa Kerajaan Demak.

Sebagai seorang penguasa Jepara, yang gemah ripah loh jinawi karena keberadaan Jepara kala itu sebagai Bandar Niaga yang ramai, Ratu Kalinyamat dikenal mempunyai jiwa patriotisme anti penjajahan. Hal ini dibuktikan dengan pengiriman armada perangnya ke Malaka guna menggempur Portugis pada tahun 1551 dan tahun 1574. Orang Portugis saat itu menyebut sang Ratu sebagai "RAINHA DE JEPARASENORA DE RICA," yang artinya Raja Jepara seorang wanita yang sangat berkuasa dan kaya raya.

Mengacu pada semua aspek positif yang telah dibuktikan oleh Ratu Kalinyamat sehingga Jepara menjadi negeri yang makmur, kuat dan mashur, maka penetapan Hari Jadi Jepara mengambil waktu beliau dinobatkan sebagai penguasa jepara, yang bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal Tahun 956 H atau 10 April 1549, ini telah ditandai dengan Candra Sengkala "Trus Karya Tataning Bumi" atau Terus Bekerja keras Membangun Daerah.

4.1.2 Wilayah Administrasi dan Kependudukan Kabupaten Jepara

Kabupaten Jepara terbagi atas 16 Kecamatan, 184 desa dan 11 Kelurahan, serta 995 RW dan 4.686 RT. Menurut klasifikasinya baik Kelurahan maupun desa di Kabupaten Jepara termasuk swasembada.

Jumlah penduduk Kabupaten Jepara akhir tahun 2013 berdasarkan hasil proyeksi dari BPS adalah sebanyak 1.153.213 jiwa yang terdiri dari 575.043 laki-laki (49,86 persen) dan 578.170 perempuan (50,14 persen), dimana sebaran penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Tahunan (109.550 Jiwa atau 9,50 persen) dan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Karimunjawa (9.016 jiwa atau 0,78 persen). Jika dilihat berdasarkan kepadatan penduduk, pada tahun 2013, kepadatan penduduk Kabupaten Jepara mencapai 1,148 jiwa per km. Penduduk terpadat berada dl Kecamatan Jepara (3.439 jiwa per km2), sedangkan kepadatan terendah berada dl Kecamatan Karimunjawa (127 jiwa per km2). Menurut kelompok umur, sebagian besar penduduk Kabupaten Jepara termasuk dalam usia produktif (15.64 tahun) sebanyak 776.665 jiwa (67,35

persen) dan selebihnya 306.004 jiwa (26,53 persen) berusia di bawah 15 tahun dan 71.544 jiwa (6,20 persen) berusia 65 tahun ke atas. Sedangkan besarnya angka ketergantungan (dependency ratio) Kabupaten Jepara adalah 486,11. (BPS Kab. Jepara, 2014)

4.1.3 Visi dan Misi Kabupaten Jepara

4.1.3.1 Visi Kabupaten Jepara

"Jepara Yang Adil Dalam Kemakmuran dan Makmur Dalam Keadilan, Dibawah Naungan Rahmat dan Hidayah Tuhan Yang Maha Esa"

4.1.3.2 Misi Kab<mark>upate</mark>n Jepara

- Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang adil, bersih, bertanggungjawab, bermartabat dengan mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam dan APBD bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
- Pemberdayaan ekonomi rakyat melalui peningkatan nilai tambah sektorsektor produktif (UMKM, Koperasi, Pertanian, Nelayan, dan Perburuhan) bagi upaya perluasan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja guna memberantas pengangguran dan kemiskinan.
- 3. Peningkatan percepatan capaian pembangunan untuk semua, serta perbaikan kualitas lingkungan; mencakup pembangunan manusia seutuhnya, lewat peningkatan mutu pendidikan, layanan publik, kesehatan, pemberdayaan ibu dan anak, pemuda, olahraga, sanitasi lingkungan, dan penataan kehidupan sosial masyarakat.

- 4. Mewujudkan masyarakat madani Kabupaten Jepara dalam sistem tatanan sosial budaya yang luhur serta berkarakter agar bermartabat.
- Terciptanya nilai budaya unggul (kreatif, produktif, dan inovatif) di dalam pergaulan tata pemerintahan daerah dan lingkungan masyarakat Kabupaten Jepara.

4.1.4 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jepara

Untuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan serta program dan kegiatan pemerintah, Kepala Daerah baik itu Gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelengaraan pemerintahan di daerah. Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah. (pemerintah.net)

Penelitian ini dilaksanakan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jepara dengan Jangka waktu 15 Maret 2017 hingga 15 Mei 2017. Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Jepara yang kami peroleh data dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL)

Berdasarkan data yang diperoleh dari BAKESBANGPOL jepara terdapat 43 OPD yang ada di Kabupaten Jepara. Sampel dari penelitian ini adalah Kepala Bagian Keuangan dan Staf Bagian Keuangan, yang ada pada

masing-masing OPD yang menjadi objek penelitian. Hasil kuisioner tersebut sebagai sumber data Primer.

Berikut informasi yang terkait dengan penyebaran kuisioner dalam penelitian ini :

Tabel 4. 1 Rincian Kuisioner Yang Telah Didistribusikan

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang telah didistribusikan	43
Kuesioner yang tidak kembali	(0)
Kuesioner yang kembali dan diolah	43

Berdasarkan 43 Kuisioner yang tersebar, kembali sebanyak 43 kuisioner. Kuisioner yang diolah sebanyak 43 kuisioner. Kemudian dari jumlah tersebut, seluruh kuesioner diisi secara lengkap, sehingga seluruhnya dapat digunakan dalam analisis data.

4.2 Deskripsi Responden

Gambaran Umum Responden merupakan Organisasi Perangkat Daerah yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki wewenang bagian keuangan pada Instansi di Kabupaten Jepara (Kepala Bagian Keuangan dan Staf Bagian Keuangan) dari 43 OPD yang ada di Kabupaten Jepara.

4.2.1 Gambaran Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut Tabel Data Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin:

Tabel 4. 2 Frekuensi Responden berdasarkan Jenis Kelamin

	5 XXXIII	Frequency	Percent
	Laki-Laki	20	46.5
Valid	Perempuan	23	53.5
	Total	43	100.0

Sumber: Hasil pengolahan data primer SPSS (2019)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang berpartisipasi dalam mengisi kuisioner di Kabupaten Jepara yang berjenis kelamin Laki-laki sebanyak 20 orang (46,5%) dan Responden Perempuan sebanyak 23 orang (53,5%).

4.2.2 Gambaran Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berikut Tabel Data Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir:

Tabel 4. 3 Frekuensi Responden berdasarkan Pendidikan

		Frequency	Percent
Valid	Strata 1	35	81.4
	Strata 2	8	18.6
	Total	43	100.0

Sumber: Hasil pengolahan data primer SPSS (2019)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang berpartisipasi dalam mengisi kuisioner di Kabupaten Jepara sebagian besar pendidikan S1 sebanyak 35 orang (81,4%) dan sisanya S2 sebanyak 8 orang (18,6%).

4.3 Analisis Data

4.3.1 Deskripsi Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel terikat (dependen) dan variabel bebas (independen). Variabel dependen adalah variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi atau yang di menjadi akibat, karena adanya variabel bebas dalam penelitian ini variabel dependen adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Perwujuan pertanggungjawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Variabel independen sering disebut variabel stimulus, predictor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang dapat mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1) , Pengendalian Akuntansi (X_2) , dan Sistem Pelaporan (X_3) .

Menurut Kennis dalam Nadirsyah, dkk (2012) menjelaskan bahwa kejelasan sasaran anggaran merupakan gambaran sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh pegawai yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut.

Menurut Indraswari (2010), bahwa sistem pengendalian yang menggunakan informasi akuntansi disebut sebagai sistem pengendalian yang berbasis akuntansi. Sistem pengendalian akuntansi adalah semua prosedur dan sistem formal yang menggunakan informasi untuk menjaga atau mengubah pola aktivitas organisasi. Dalam hal ini yang termasuk

pengendalian akuntansi adalah sistem perencanaan, sistem pelaporan dan prosedur monitoring yang didasarkan pada informasi.

Sistem pelaporan merupakanlaporan yang menggambarkan system pertanggungjawaban dari bawahan (pimpnan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). Sistem pelaporan yang baik sangat diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan (Abdullah, 2005).

Tabel 4. 4 Deskripsi Statistik

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)	43	15	25	19.91	2.724
Pengendalian Akuntansi (X2)	43	25	40	31.95	3.811
Sistem Pelaporan (X3)	43	8	15	11.58	1.776
Akutanbilitas Kinerja (Y)	43	15	25	20.00	2.628
Valid N (listwise)	43				

Sumber: Hasil pengolahan data primer SPSS v.20, 2019

Untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel penelitian, peneliti menggunakan tabel statistik deskriptif yang terjadi pada tabel di atas. Dari tabel tersebut, berdasarkan jawaban dari 80 responden maka hasil pengukuran variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X₁) di peroleh skor jawaban rata-rata (mean) 19,91 dengan standar deviasi 2,724. Hasil pengukuran variabel Pengendalian Akuntansi (X₂) di peroleh skor jawaban rata-rata (mean) 31,95 dengan standar deviasi 3,811. Dan hasil pengukuran variabel Sistem Pelaporan (X₃) di peroleh skor jawaban rata-rata (mean)

11,58 dengan standar deviasi 1,776. Serta Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) di peroleh skor jawaban rata-rata (mean) 20,00 dengan standar deviasi 2,628.

4.3.2 Analisis Statistik Deskriptif

4.3.2.1 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)

Berdasarkan hasil survey kuesioner terhadap 43 orang responden dapat dilihat dari frekuensi jawaban responden tentang Kejelasan Sasaran Anggaran pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel 4. 5 Kej<mark>elas</mark>an Sasaran Anggaran (Pernyata<mark>an 1</mark>)

		Frequency	Percent
	Netral	7	16.3
	Setuju	28	65.1
Valid	Sangat Setuju	8	18.6
	Total	43	100.0

Sumber: Hasil pengolahan data primer SPSS v.20, 2019 P

ada tabel diatas diketahui bahwa dari 43 orang responden yang memberikan jawaban dari pernyataan yang pertama 28 orang (65,1%) dari responden

menjawab setuju, 7 orang (16,3%) dari responden menjawab snetral, 8 orang (16,6%) dari responden menjawab sangat setuju.

Tabel 4. 6 Kejelasan Sasaran Anggaran (Pernyataan 2)

		Frequency	Percent
	Netral	16	37.2
	Setuju	20	46.5
Valid	Sangat Setuju	7	16.3
	Total	43	100.0

Sumber: Hasil pengolahan data primer SPSS v.20, 2019

Pada tabel diatas diketahui bahwa dari 43 orang responden yang memberikan jawaban dari pernyataan yang kedua 16 orang (37,2%) dari responden menjawab menyatakan netral, 20 orang (46,5%) dari responden menjawab setuju, 7 orang (16,3%) dari responden menjawab sangat setuju.dapat disimpulkan bahwa rata-rata respon memilih jawaban setuju.

Tabel 4. 7 Kejelasan Sasaran Anggaran (Pernyataan 3)

		Frequency	Percent
	Netral	9	20.9
	Setuju	19	44.2
Valid	Sangat Setuju	15	34.9
	Total	43	100.0

Pada tabel diatas diketahui bahwa dari 43 orang responden yang memberikan jawaban dari pernyataan yang ketiga 9 orang (20,9%) dari responden menjawab netral, 19 orang (44,2%) dari responden menjawab setuju, 15 orang (34,9%) dari responden menjawab sangat setuju.

Tabel 4. 8 Kejelasan Sasaran Anggaran (Pernyataan 4)

		Frequency	Percent
	Netral	8	18.6
	Setuju	21	48.8
Valid	Sangat Setuju	14	32.6
	Total	43	100.0

Sumber: Hasil pengolahan data primer SPSS v.20, 2019

Pada tabel diatas diketahui bahwa dari 43 orang responden yang memberikan jawaban dari pernyataan yang keempat 8 orang (18,6%) dari responden menjawab netral, 21 orang (48,8%) dari responden menjawab setuju, 14 orang (32,6%) dari responden menjawab sangat setuju.

Tabel 4. 9 Kejelasan Sasaran Anggaran (Pernyataan 5)

		Frequency	Percent
	Netral	15	34.9
	Setuju	21	48.8
Valid	Sangat Setuju	7	16.3
	Total	43	100.0

Sumber: Hasil pengolahan data primer SPSS v.20, 2019

Pada tabel diatas diketahui bahwa dari 43 orang responden yang memberikan jawaban dari pernyataan yang kelima 15 orang (34,9%) dari responden menjawab tidak pasti/ netral, 21 orang (48,8%) dari responden menjawab setuju, 7 orang (16,3%) dari responden menjawab sangat setuju.

4.3.2.2 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Pengendalian Akuntansi (X2)

Berdasarkan hasil survey kuesioner terhadap 80 orang responden dapat dilihat dari frekuensi jawaban responden tentang Pengendalian Akuntansi pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel 4. 10 Pengendalian Akuntansi (Pernyataan 6)

		Frequency	Percent
	Netral	9	20.9
	Setuju	24	55.8
Valid	Sangat Setuju	10	23.3
	Total	43	100.0

Pada tabel diatas diketahui bahwa dari 43 orang responden yang memberikan jawaban dari pernyataan yang keenam 9 orang (20,9%) dari responden menjawab tidak pasti/netral, 24 orang (55,8%) dari responden menjawab setuju, 10 orang (23,3%) dari responden menjawab sangat setuju.

Tabel 4. 11 Pengendalian Akuntansi (Pernyataan 7)

		Frequency	Percent
	Netral	9	20.9
	Setuju	26	60.5
Valid	Sangat Setuju	8	18.6
	Total	43	100.0

Sumber: Hasil pengolahan data primer SPSS v.20, 2019

Pada tabel diatas diketahui bahwa dari 43 orang responden yang memberikan jawaban dari pernyataan yang ketujuh 9 orang (20,9%) dari responden menjawab tidak pasti/netral, 26 orang (60,5%) dari responden menjawab setuju, 8 orang (18,6%) dari responden menjawab sangat setuju.

Tabel 4. 12 Pengendalian Akuntansi (Pernyataan 8)

		Frequency	Percent
	Netral	6	20.9
	Setuju	29	60.5
Valid	Sangat Setuju	8	18.6
	Total	43	100.0

Pada tabel diatas diketahui bahwa dari 43 orang responden yang memberikan jawaban dari pernyataan yang kedelapan 6 orang (20,9%) dari responden menjawab netral, 29 orang (60,5%) dari responden menjawab setuju, 8 orang (18,6%) dari responden menjawab sangat setuju.

Tabel 4. 13 Pengendalian Akuntansi (Pernyataan 9)

		Frequency	Percent
	Tidak Setuju	1	2.3
	Netral	6	14.0
Valid	Setuju	27	62.8
	Sangat Setuju	9	20.9
	Total	43	100.0

Sumber: Hasil pengolahan data primer SPSS v.20, 2019

Pada tabel diatas diketahui bahwa dari 43 orang responden yang memberikan jawaban dari pernyataan yang kesembilan 1 orang (2,3%) dari responden menjawab tidak setuju, 6 orang (14%) dari responden menjawab tidak pasti/netral, 27 orang (62,8%) dari responden menjawab setuju, 9 orang (27.9%) dari responden menjawab sangat setuju

Tabel 4. 14 Pengendalian Akuntansi (Pernyataan 10)

		Frequency	Percent
	Tidak Setuju	1	2.3
	Netral	8	18.6
Valid	Setuju	27	62.8
	Sangat Setuju	7	16.3
	Total	43	100.0

Sumber: Hasil pengolahan data primer SPSS v.20, 2019

Pada tabel diatas diketahui bahwa dari 43 orang responden yang memberikan jawaban dari pernyataan yang kesepuluh 1 orang (2,3%) dari responden menjawab tidak setuju, 8 orang (18,6%) dari responden menjawab tidak pasti, 27 orang (62,8%) dari responden menjawab setuju, 7 orang (16,3%) dari responden menjawab sangat setuju.

Tabel 4. 15 Pengendalian Akuntansi (Pernyataan 11)

		Frequency	Percent
	Netral	9	20.9
	Setuju	18	41.9
Valid	Sangat Setuju	16	37.2
	Total	43	100.0

Pada tabel diatas diketahui bahwa dari 43 orang responden yang memberikan jawaban dari pernyataan yang kesebelas 9 orang (20,9%) dari responden menjawab tidak pasti 18 orang (41,9%) dari responden menjawab setuju, 16 orang (37,2%) dari responden menjawab sangat setuju.

Tabel 4. 16 Pengendalian Akuntansi (Pernyataan 12)

		Frequency	Percent
	Netral	10	23.3
	Setuju	27	62.8
Valid	Sangat Setuju	6	14.0
	Total	43	100.0

Sumber: Hasil pengolahan data primer SPSS v.20, 2019

Pada tabel diatas diketahui bahwa dari 43 orang responden yang memberikan jawaban dari pernyataan yang keduabelas 10 orang (23,3%) dari responden menjawab tidak pasti, 27 orang (62,8%) dari responden menjawab setuju, 6 orang (14%) dari responden menjawab sangat setuju.

Tabel 4. 17 Pengendalian Akuntansi (Pernyataan 13)

		Frequency	Percent
	Netral	9	20.9
	Setuju	30	69.8
Valid	Sangat Setuju	4	9.3
	Total	43	100.0

Sumber: Hasil pengolahan data primer SPSS v.20, 2019

Pada tabel diatas diketahui bahwa dari 43 orang responden yang memberikan jawaban dari pernyataan yang ketiga belas 9 orang (20,9%) dari responden menjawab tidak pasti, 30 orang (69,8%) dari responden menjawab setuju, 4 orang (9,3%) dari responden menjawab sangat setuju.

4.3.2.3 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Sistem Pelaporan (X3)

Berdasarkan hasil survey kuesioner terhadap 43 orang responden dapat dilihat dari frekuensi jawaban responden tentang Sistem Pelaporan pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel 4. 18 Sistem Pelaporan (Pernyataan 14)

P

		Frequency	Percent
	Tidak Setuju	1	2.3
	Netral	15	34.9
Valid	Setuju	18	41.9
	Sangat Setuju	9	20.9
	Total	43	100.0

Sumber: Hasil pengolahan data primer SPSS v.20, 2019

Pada tabel diatas diketahui bahwa dari 43 orang responden yang memberikan jawaban dari pernyataan yang ke lima belas 1 orang (2,3%) dari responden menjawab tidak setuju, 15 orang (34,9%) dari responden menjawab tidak pasti, 18 orang (41,4%) dari responden menjawab setuju, 9 orang (20,9%) dari responden menjawab sangat setuju.

Tabel 4. 19
Sistem Pelaporan (Pernyataan 15)

		Frequency	Percent
	Netral	8	18.6
Valid	Setuju	30	69.8
	Sangat Setuju	5	11.6
	Total	43	100.0

Sumber: Hasil pengolahan data primer SPSS v.20, 2019

Pada tabel diatas diketahui bahwa dari 43 orang responden yang memberikan jawaban dari pernyataan yang ke enam belas 8 orang (18,6%)

dari responden menjawab netral, 30 orang (69,8%) dari responden menjawab setuju, 5 orang (11,6%) dari responden menjawab sangat setuju.

Tabel 4. 20 Sistem Pelaporan (Pernyataan 16)

		Frequency	Percent
	Tidak Setuju	1	2.3
	Netral	13	30.2
Valid	Setuju	21	48.8
	Sangat Setuju	8	18.6
	Total	43	100.0

Sumber: Hasil pengolahan data primer SPSS v.20, 2017

Pada tabel diatas diketahui bahwa dari 43 orang responden yang memberikan jawaban dari pernyataan yang ke lima belas 1 orang (2,3%) dari responden menjawab tidak setuju, 13 orang (30,2%) dari responden menjawab tidak pasti, 21 orang (48,8%) dari responden menjawab setuju, 8 orang (18,6%) dari responden menjawab sangat setuju.

4.3.2.4 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Berdasarkan hasil survey kuesioner terhadap 43 orang responden dapat dilihat dari frekuensi jawaban responden tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tabel-tabel berikut ini

Tabel 4. 21 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Pernyataan 17)

		Frequency	Percent
	Netral	10	23.3
Valid	Setuju	17	39.5
	Sangat Setuju	16	37.2
	Total	43	100.0

Pada tabel diatas diketahui bahwa dari 43 orang responden yang memberikan jawaban dari pernyataan yang ke tujuh belas 10 orang (23,3%) dari responden menjawab tidak pasti, 17 orang (39,5%) dari responden menjawab setuju, 16 orang (37,2%) dari responden menjawab sangat setuju.

Tabel 4. 22 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Pernyataan 18)

		Frequency	Percent
	Netral	10	23.3
Valid	Setuju	23	53.5
	Sangat Setuju	10	23.3
	Total	43	100.0

Pada tabel diatas diketahui bahwa dari 43 orang responden yang memberikan jawaban dari pernyataan yang ke delapan belas 10 orang (23,3%) dari responden menjawab tidak pasti, 23 orang (53,5%) dari responden menjawab setuju, 10 orang (23,3%) dari responden menjawab sangat setuju.

Tabe<mark>l 4.</mark> 23 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Pernyataan 19)

		Frequency	Percent
	Netral	6	14.0
Valid	Setuju	29	67.4
	Sangat Setuju	8	18.6
	Total	43	100.0

Sumber: Hasil pengolahan data primer SPSS v.20, 2019

Pada tabel diatas diketahui bahwa dari 43 orang responden yang memberikan jawaban dari pernyataan yang ke sembilan belas 6 orang (14%) dari responden menjawab tidak pasti, 29 orang (67,4%) dari responden menjawab setuju, 8 orang (18,6%) dari responden menjawab sangat setuju.

Tabel 4. 24 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Pernyataan 20)

		Frequency	Percent
	Netral	11	25.6
Valid	Setuju	25	58.1
	Sangat Setuju	7	16.3
	Total	43	100.0

Sumber: Hasil pengolahan data primer SPSS v.20, 2019

Pada tabel diatas diketahui bahwa dari 43 orang responden yang memberikan jawaban dari pernyataan yang ke dua puluh 11 orang (25,6%) dari responden menjawab tidak pasti, 25 orang (58,1%) dari responden menjawab setuju, 7 orang (16,3%) dari responden menjawab sangat setuju.

Tabel 4. 25 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Pernyataan 21)

		Frequency	Percent
	Tidak Setuju	1	2.3
	Netral	6	14.0
Valid	Setuju	32	74.4
	Sangat Setuju	4	9.3
	Total	43	100.0

Pada tabel diatas diketahui bahwa dari 43 orang responden yang memberikan jawaban dari pernyataan yang ke dua puluh satu, 1 orang (2,3%) dari responden menjawab tidak setuju, 6 orang (14%) dari responden menjawab tidak pasti, 32 orang (74,4%) dari responden menjawab setuju, 4 orang (9,3%) dari responden menjawab sangat setuju.

4.3.3 Uji Kualitas Data

4.3.3.1 Uji Validitas

Menurut Ghozali (2013) dalam Utama (2013) Uji validitas ini digunakan untuk mengukur valid atau tidak kuesioner tersebut. Kuesioner dikatakan valid jika pernyataan yang terdapat dalam kuesioner tersebut mampu mengungkap sesuatu yang akan diukurdalam kuesioner tersebut. pengukuran validitas pertanyaan dalam kuesioner tersebut diukur dengan melakukan korelasi skor item pertanyaan dengan total skor variabel. Ketika

probabilitas menunjukkan hasil yang signifikan yaitu <0,01 atau <0,05 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pertanyaan tersebut valid.

Analisis dilakukan terhadap semua butir-butir pernyataan kuesioner dengan bantuan program SPSS v.20, dimana batas angka kritis (α) adalah 0,05 (5%). Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r-hitung dengan r-tabel (*one-tailed*) untuk *degree of freedom* (df) = N - 2, dalam hal ini N adalah jumlah sampel. Nilai r-hitung dilihat dari kolom *Corrected Item-Total Correlation*. Suatu butir pernyataan dikatakan valid apabila nilai dari *Corrected Item-Total Correlation* atau r-hitung > r-tabel. (Ghozali, 2013).

Uji validitas pada masing-masing variabel dengan bantuan program SPSS v.20 diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran

Setelah dilakukan perhitungan dengan cara mengkoreksi tiap butir pernyataan dengan jumlah skor, maka hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 26 Hasil Uji Validitas Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran

Item Pernyataan	r- hitung	r– tabel	Hasil
Pernyataan 1	0.763	0,2542	Valid
Pernyataan 2	0.723	0,2542	Valid
Pernyataan 3	0.841	0,2542	Valid
Pernyataan 4	0.821	0,2542	Valid
B Pernyataan 5	0.807	0,2542	Valid

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan bahwa hasil uji validitas menunjukkan semua pernyataan nilai r-hitung > r-tabel. Hal ini berarti variabel Kejelasan Sasaran Anggaran dapat disimpulkan lulus uji validitas.

b. Variabel Pengendalian Akuntansi

Setelah dilakukan perhitungan dengan cara mengkoreksi tiap butir pernyataan dengan jumlah skor, maka hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 27 Hasil Uji Validitas Pengendalian Akuntansi

Item Pernyataan	r- hitung	r- tabel	Hasil
Pernyataan 6	0.871	0,2542	Valid
Pernyataan 7	0.823	0,2542	Valid
Pernyataan 8	0.782	0,2542	Valid
Pernyataan 9	0.690	0,2542	Valid
Pernyataan 10	0.617	0,2542	Valid
Pernyataan 11	0.708	0,2542	Valid
Pernyataan 12	0.795	0,2542	Valid
Pernyataan 13	0.723	0,2542	Valid

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan bahwa hasil uji validitas menunjukkan semua pernyataan nilai r-hitung > r-tabel. Hal ini berarti variabel Pengendalian Akuntansi dapat disimpulkan lulus uji validitas.

c. Variabel Sistem Pelaporan

Setelah dilakukan perhitungan dengan cara mengkoreksi tiap butir pernyataan dengan jumlah skor, maka hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 28 Hasil Uji Validitas Sistem Pelaporan

Item Pernyataan	r- hitung	r- tabel	Hasil
Pernyataan 14	0.866	0,2542	Valid
Pernyataan 15	0.758	0,2542	Valid
Pernyataan 16	0.904	0,2542	Valid

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan bahwa hasil uji validitas menunjukkan semua pernyataan nilai r-hitung > r-tabel. Hal ini berarti variabel Sistem Pelaporan dapat disimpulkan lulus uji validitas.

d. Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Setelah dilakukan perhitungan dengan cara mengkoreksi tiap butir pernyataan dengan jumlah skor, maka hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 29 Hasil Uji Validitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Item Pernyataan	r- hitung	r- tabel	Hasil
Pernyataan 17	0.878	0,2542	Valid
Pernyataan 18	0.880	0,2542	Valid
Pernyataan 19	0.756	0,2542	Valid
Pernyataan 20	0.699	0,2542	Valid
Pernyataan 21	0.795	0,2542	Valid

Sumber: Hasil pengolahan data primer SPSS v.20, 2019

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan bahwa hasil uji validitas menunjukkan semua pernyataan nilai r-hitung > r-tabel. Hal ini berarti variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahdapat disimpulkan lulus uji validitas.

4.3.3.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas ini digunakan dengan tujuan untuk menentukan apakah kuesioner tersebut apabila digunakan lebih dari satu kali terdapat gejala yang sama dengan alat ukur yang sama pula. Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban sesorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu Konstruk atau variable dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,70. (Ghozali ,2013),

Adapun hasil reliabilitas dari setiap variabel dapat dilihat sebagai berikut

Tabel 4. 30 Hasil Reabilitas setiap variabel

Variable	Cronbach's Alpha	Nilai Kritis	Keterangan
Kejelasan Sasaran Anggaran (X ₁)	0,803	0,7	Reliable
Pengendalian Akuntansi (X ₂)	0,781	0,7	Reliable
Sistem Pelaporan (X ₃)	0,844	0,7	Reliable
Akutanbilitas Kinerja (Y)	0,807	0,7	Reliable

Sumber: Hasil pengolahan data primer SPSS v.20, 2019

Berdasarkan tabel diatas memperlihatkan bahwa variabel Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan memiliki *Cronbach's Alpha* > 0,7 maka dikatakan reliabel. Dengan demikian syarat reliabilitas sebagai alat ukur terpenuhi.

4.3.4 Uji Asumsi Klasik

4.3.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas ini digunakan untuk menguji apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Adapun data yang baik merupakan data yang memiliki pola distribusi yang normal. Uji normalitas ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode *kolmogorov smirnov*, yakni dengan melihat signifikasi pada 0,05. Apabila nilai signifikasi yang dihasilkan > 0,05 maka distribusi tersebut akan normal. Dari hasil pengolahan SPSS diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4. 31 One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S)

		Unstandardiz ed Residual
N		43
	Mean	0E-7
Normal Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	1.61242227
	Absolute	.064
Most Extreme Differences	Positive	.064
	Negative	058
Kolmogorov-Smirnov Z	Z	.420
Asymp. Sig. (2-tailed)		.995

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

Dari tabel diatas dapat dilihat hasil pengujian normalitas data dengan uji *One-Sample* Kolmogorov-*Smirnov Test* di atas menunjukkan nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,995 yang lebih tinggi dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa data residual berdistribusi normal.

4.3.4.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas merupakan suatu kejadian yang menginformasikan terjadinya hubungan diantara variabel independen atau variabel bebas (X).Uji mutikolinieritas ini dapat dilihat dari besaran VIF

(*Variance Inflation Factor*) dan tolerance.dengan ketentuan Apabila nilai tolerance < 0,1 dan VIF >10 maka terjadi multikolonieritas, dan Apabila nilai tolerance >0,1 dan VIF < 10 maka tidak terjadi multikolonieritas. Dari hasil pengolahan SPSS diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4. 32 Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics		
		Tolerance	VIF	
4	(Constant)	X * 7		
	Kejelasan Sasaran Anggaran	0.353	2.834	
	Pengendalian Akuntansi	0.347	2.883	
4	Sistem Pelaporan	0.458	2.183	

a. Dependent Variabel: Akuntabilitas Kinerja Instansi

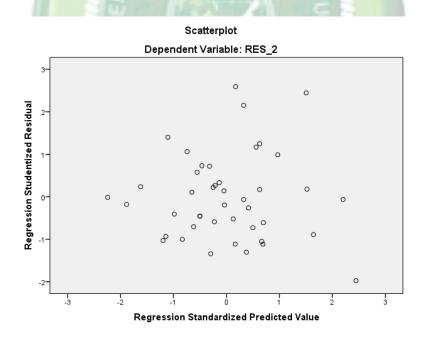
Sumber: Hasil pengolahan data primer SPSS v.20, 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat hasil perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai *Tolerance* lebih dari > 0,10. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* juga menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai VIF kurang dari < 10.Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

4.3.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini merupakan uji yang mempunyai tujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi terdapat ketidaksamaan varian residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Untuk menguji heteroskedastisitas digunakan grafik *scatter plot*, dengan ketentuan apabila tidak terdapat pola yang jelas dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terdapat heteroskedastisitas. Adapun model yang baik yaitu model yang tidak mengalami heteroskedastisitas.

Dari hasil pengolahan SPSS diperoleh sebagai berikut:



Gambar 4. 1 Grafik Scatterplot

Dari gambar 4.1 dapat dilihat hasil tampilan output SPSSmenunjukkan bahwa garis regresi lurus horizontal dan titik-titik berada acak diatas dan dibawah garis sehingga dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung Heteroskedastisitas.

Untuk lebih mendukung hasil dari Scaterplot, peneliti menambahkan Uji Heteroskedastisidastisitas dengan uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara nilai absolut residual dengan variabel independen. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4. 33 Uji Glejser

Coefficients^a

	Coefficients						
Model			andardized efficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	
		В	Std. Error	Beta		_	
	(Constant)	.681	1.208		.564	.576	
1	Kejelasan Sasaran Anggaran	.125	.087	.375	1.436	.159	
	Pengendalian Akuntansi	069	.063	287	-1.091	.282	
	Sistem Pelaporan	.021	.117	.040	.175	.862	

a. Dependent Variable: RES_2

Sumber: Output SPSS 2019

Berdasarkan hasil uji Glejser, dapat dilihat bahwa niai signifikan untuk Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1) adalah sebesar 0,159, nilai signifikan untuk Pengendalian Akuntansi (X_2) adalah sebesar 0,282, dan

signifikan untuk Sistem Pelaporan (X_3) adalah sebesar 0,862 Karena nilai tersebut lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan tidak terjadi Heterokedastisitas

4.3.4.4 Uji Autokolerasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji *Durbin Watson* dengan keputusan ($d_U \leq dw \leq 4 - d_U$). Jika nilai *durbin watson* terletak pada daerah lebih dari du dan lebih kecil dari d_L ($d_U \leq dw \leq 4 - d_U$) maka model terbebas dari asumsi autokorelasi. (Ghozali, 2003).

Dari hasil pengolahan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 34 Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.812 ^a	.659	.633	1.592	1.757

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil pengolahan data primer SPSS v.20, 2019

Perhitungan tabel *durbin-watson* untuk menentukan nilai batas atas (d_U) dan batas bawah (d_L) dengan banyaknya observasi (n) = 43 dan nilai k sebanyak 3 didapat d_U sebesar 1.3663 dan nilai d_L sebesar 1.6632.

Berdasarkan tabel 4.36 nilai *durbin-watson* (dw) sebesar 1,757 lebih besar dari (d_U)= 1.3663 dan lebih dari nilai 4- d_U = 1..6632 maka dapat disimpulkan bahwa hasil estimasi terbebas dari autokorelasi.

4.3.5 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi merupakan alat statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel terhadap satu buah variabel. Hasil uji dengan bantuan SPSS v.20 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. 35 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		g: -
		В	Std. Error	Beta	t	Sig.
	(Constant)	2.287	2.101		1.08	.283
1	Kejelasan Sasaran Anggaran	.403	.152	.417	2.65	.012
	Pengendalian Akuntansi	.248	.109	.359	2.26	.029
	Sistem Pelaporan	.154	.204	.104	.755	.455

a. Dependent Variable: Akutanbilitas Kinerja

Sumber: Hasil pengolahan data primer SPSS v.20, 2019

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas dapat dilihat pada kolom *Unstandardized Coefficients*. Karena ukuran variabel sama dan menggunakan skala likert maka tidak perlu di standarized terlebih dahulu sehingga menggunakan B pada kolom *Unstandardized Coefficients*, dan diperoleh model persamaan linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 2,287 + 0,403X_1 + 0,248X_2 + 0,154X_3 + e$$

Interpretasi dari persamaan regresi berganda di atas adalah sebagaiberikut:

- Konstanta (a) = 2,287 menunjukkan harga konstan, dimana jika tidak ada variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X₁), Pengendalian Akuntansi (X₂), dan Sistem Pelaporan (X₃), maka nilai harga dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) adalah sebesar 2,287.
- 2. Koefisien regresi variabel Kejelasan Sasaran Anggaran $(X_1) = 0,403$ menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1) akan mendorong peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 40,3%.
- 3. Koefisien regresi variabel Pengendalian Akuntansi $(X_2) = 0,248$ menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel Pengendalian Akuntansi (X_2) akan mendorong peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 24,8%.

- 4. Koefisien regresi variabel Sistem Pelaporan $(X_3) = 0,154$ menunjukkan setiap kenaikan 1 satuan variabel Sistem Pelaporan (X_3) akan mendorong peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 15,4.
- 5. Standar error (e) menunjukkan tingkat kesalahan pengganggu

4.3.6 Uji Hipotesis

4.3.6.1 Uji Signifikansi t (Uji Parsial)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai thitung dengan trabel (two-tailed) untuk degree of freedom (df) = N - 4, dalam hal ini N adalah jumlah sampel dan pembandingan antara probabilitas signifikansi dengan significance level 0,05 (a=5%). Nilai t-hitung diperoleh dari output SPSS v.20 dapat tabel $Coefficients^a$ pada kolom t. Sedangkan nilai trabel diperoleh dari pengujian dua sisi signifikan 5% dengan (df) = 43, maka nilai trabel adalah sebesar 1,68365. Dari perhitungan komputer dapat dilihat dalam tabel di atas. Jika trabel dan signifikan > 0,05 maka Ha ditolak, sedangkan jika trabel dan signifikan < 0,05 maka Ha diterima. Berikut adalah hasil uji dengan bantuan SPSS v.20 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

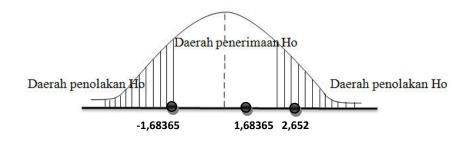
Tabel 4. 36 Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	t-	t-tabel	Prob Sig.		Keterangan
v arraber	hitung	1-14061	Sig.	a = 5%	Reterangan
Kejelasan Sasaran Anggaran (X ₁)	2,652	1,68365	0,012	0,05	signifikan
Pengendalian Akuntansi(X ₂)	2,263	1,68365	0,029	0,05	signifikan
Sistem Pelaporan (X ₃)	0,755	1,68365	0,455	0,05	Tidak
Sistem Feraporan (A ₃)					signifikan

Sumber: Hasil analisis SPSS, 2019

4.3.6.1.1 Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)

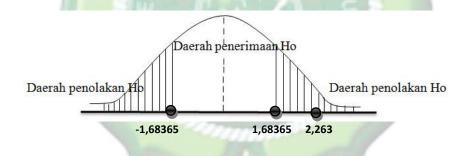
Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk membuktikan pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan dengan pengujian statistik. Dari tabel 4.38 di atas, dapat dilihat bahwa variabel Kejelasan Sasaran Anggaran memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 2,652 > 1,68365 dengan nilai signifikansi 0,012 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran (X₁) berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y), dan kesimpulannya \mathbf{H}_1 diterima.



Gambar 4. 2 Daerah Penerimaan Uji Hipotesis 1

4.3.6.1.2 Uji Pengendalian Akuntansi

Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk membuktikan pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan dengan pengujian statistik. Dari tabel 4.38 di atas, dapat dilihat bahwa variabel Pengendalian Akuntansi nilai t_{hitung} > t_{tabel} yaitu 2,263 > 1,68365 dengan nilai signifikansi 0,029 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Pengendalian Akuntansi (X₂) berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y), dan kesimpulannya H₂ diterima.

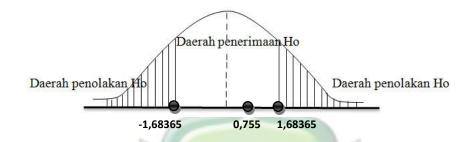


Gamb<mark>ar</mark> 4. 3 Daerah Penerimaan Uji Hipotesis 1

4.3.6.1.3 Uji Sistem Pelaporan

Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk membuktikan pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan dengan pengujian statistik. Dari tabel 4.38 di atas, dapat dilihat bahwa variabel Pengendalian Akuntansi nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu 0,755 > 1,68365 dengan nilai signifikansi 0,455 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Sistem Pelaporan (X_2) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y), dan kesimpulannya **H**₃ ditolak.



Gambar 4. 4 Daerah Penerimaan Uji Hipotesis 1

4.3.6.2 Uji Signifikansi F (Uji Simultan)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model yang memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 2011), Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai f_{hitung} dengan f_{tabel} untuk *degree of freedom* (df) = N - 3, dalam hal ini N adalah jumlah sampel dan pembandingan antara probabilitas signifikansi dengan *significance level* 0,05 (a =5%). Nilai F_{hitung} diperoleh dari output SPSS v.20 dapat tabel $ANOVA^a$ pada kolom F.

Sedangkan nilai F_{tabel} diperoleh dari pengujian dua sisi signifikan 5% dengan (df) = 40, maka nilai F_{tabel} adalah sebesar 2,61. Dari perhitungan komputer dapat dilihat dalam tabel di atasJika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan signifikan > 0,05 maka H_a ditolak. Sedangkan jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan signifikan < 0,05

maka H_a diterima. Berikut adalah hasil uji dengan bantuan SPSS v.20 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. 37 Hasil Uji Signifikansi F

ANOVA^a

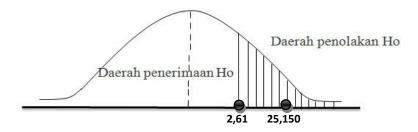
		Sum of		Mean		
Model		Squares	Df	Square	F	Sig.
1	Regression	191.179	3	63.726	25.150	.000 ^b
	Residual	98.821	39	2.534		
	Total	290.000	42			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Sumber: Hasil pengolahan data primer SPSS v.20, 2019

Pengujian hipotesis ini dilakukan secara serempak atau bersama untuk membuktikan pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran (X1), Pengendalian Akuntansi (X2), dan Sistem Pelaporan (X3) terhadap Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) yang dilakukan dengan pengujian statistik. Dari tabel ANOVA^a di atas, dapat dilihat bahwa nilai f hitung > f tabel yaitu 25,150 > 2,61 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran (X1), Pengendalian Akuntansi (X2), dan Sistem Pelaporan (X3) berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y), dan kesimpulannya H₄ diterima.



Gambar 4. 5 Daerah Penerimaan Uji F

4.3.6.3 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen (Ghozali, 2011). Hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel output berikut ini:

Tabel 4. 38 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

				Std. Error of
Model	R	R Square	Adjusted R Square	the Estimate
1	.812ª	.659	.633	1.592

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil pengolahan data primer SPSS v.20, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (*R Square*) yang diperoleh adalah sebesar 0,659 atau 65,9%. Hal ini

menunjukkan bahwa besarnya pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran (X1), Pengendalian Akuntansi (X2), dan Sistem Pelaporan (X3), terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) sebesar 65,9%. Sedangkan sisanya sebesar 35,1% merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jepara

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama dapat dilihat bahwa variabel Kejelasan Sasaran Anggaran memiliki nilai t hitung > t tabel yaitu 2,652 > 1,68365 dengan nilai signifikansi 0,012 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran (X₁) berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Dari formula yang diuraikan pada pengujian hipotesis, maka dapat dikatakan H₁ diterima. Artinya Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini berarti semakin jelas sasaran anggaran daerah, maka akan mempermudah untuk mempertanggung jawabkan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan pengisian kuesioner yang diolah terdapat banyak responden yang berpendapat bahwa setiap pegawai keuangan yang berperan

dalam perencanaan kerja dan anggaran, mampu memahami pusat tanggung jawab dalam pekerjaanya. Adanya sasaran anggaran yang jelas dapat mempermudah pegawai untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tingkat pengembalian anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga sesuai dengan rencana anggaran. Karena ketidak jelasan sasaran anggaran dapat menimbulkan ketidak pastian atau keragu-raguan para penanggungjawab/ pelaksana dalam penentuan anggaran. Sehingga, dapat disimpulkan, bahwa kejelasan sasaran anggaran yang semakin baik dapat memberikan pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Oleh Karena itu dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jepara sangat di perlukan tujuan anggaran yang ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat di mengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut.

Hasil pengujian hipotesis didukung bahwa hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Anjarwati (2012) yaitu kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di wilayah Tegal dan Pemalang, hal serupa juga di ungkapkan oleh Primayoni (2014) yang dalam penelitiannya yaitu Kejelasan sasaran anggaran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di kabupaten klungkung.

4.4.2 Pengaruh Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jepara

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua dapat dilihat bahwa variabel Pengendalian Akuntansi memiliki nilai t hitung > t tabel yaitu 2,263 > 1,68365 dengan nilai signifikan 0,029 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Pengendalian Akuntansi (X₂) berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Dari formula yang diuraikan pada pengujian hipotesis, maka dapat dikatakan H₂ diterima yang berarti Pengendalian Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini berarti semakin baik pengendalian Akuntansi, maka dapat mengurangi tingkat kekeliruan(tidak sengaja) atau ketidak beresan(sengaja) sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan pengisian kuesioner yang diolah terdapat banyak responden yang berpendapat bahwa kejelasan pusat kegiatan yang ada pada instansi lebih mengurangi kekeliruan yang akan terjadi, karena didalam pengendalian setiap pegawai harus mengetahui maksud dari pengambilan keputusan.Pengendalian Akuntansi yang diterapkan bukan untuk menghilangkan segala kemungkinan kesalahan atau penyimpangan, namun sifat struktur dari pengendalian Akuntansi akan menekan terjadinya kekeliruan dan ketidak beresan atau penyelewengan dalam menjalankan aktivitas pada suatu organisasi. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk

menekan terjadinya kekeliruan/penyelewengan dalam menjalankan aktivitas pada suatu organisasi dan juga untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jepara sangat di perlukan Pengendalian Akuntansi.

Hasil pengujian hipotesis didukung hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Penelitian Herawati (2011) yaitu pengendalian akuntansi memberi pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dan juga pada Primayoni (2014) yang dalam penelitiannya yaitu Efektivitas Pengendalian Internal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di kabupaten klungkung.

4.4.3 Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jepara

Berasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga dapat dilihat bahwa variabel Sistem Pelaporan memiliki nilai t hitung < t tabel yaitu 0,755 > 1,68365 dengan nilai signifikansi 0.455 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Sistem Pelaporan (X₁) tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Dari formula yang diuraikan pada pengujian hipotesis, maka dapat dikatakan **H**₃ **ditolak**. Artinya sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini berarti mau baik atau buruk sistem pelaporan, maka tidak akan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem laporan anggaran yang tidak merinci dari tiap-tiap varians menjadi salah

satu faktor penyebab ramalan tahunan (penyimpangan), Maka dilakukan tindakan untuk mengkoreksi agar tindakan koreksi bisa efektif.

Berdasarkan pengisian kuesioner yang diolah terdapat banyak responden yang berpendapat bahwa agar tindakan koreksi efektif, maka suatu organisasi perlu memperhatikan lamanya waktu koreksi yang di butuhkan dalam mengkoreksi dan menyusun laporan, karena suatu laporan harus memiiki ciri relevan,tepat waktu, dan dapat di percaya/diandalkan, mudah dimengerti (jelas dan cermat) maka penanggung jawab laporan harus memiliki sifat yang jujur. Sistem pelaporan yang baik tidak dapat membantu mengendalikan kinerja Instansi Pemerintah dalam mengimplementasikan anggaran yang telah di tetapkan.

Oleh Karena itu dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jepara tidak harus di perlukan Sistem Pelaporan yang baik. Karena untuk menghasilkan Informasi Keuangan hanya di butuhkan sebuah perencanaan yang sesuai dalam suatu organisasi.

Hasil pengujian hipotesis tidak mendukung hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Anjarwati (2012) yaitu Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di wilayah Tegal dan Pemalang, hal serupa juga di ungkapkan dalam penelitian yang dilakukan Herawaty (2011) variabel sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kota Jambi. Indraswari (2010) dalam penelitiannya variabel sistem pelaporan

berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah provinsi Jawa Tengah, dan Abdullah(2004) dengan variabel sitem pelaporan yang menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Yogyakarta.

4.4.4 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat pada Tabel 4.35 nilai F hitung adalah 25,150. Perbandingan nilai F_{hitung} dengan nilai F_{tabel} dengan nilai fhitung > f tabel yaitu 25,150 > 2,61 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Yang berarti **H4 diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Ketidakjelasan anggaran dapat menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung dan tidak puas dalam pencapaiannya sehingga tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Begitu juga dengan Pengendalian Akuntansi sebagai alat pengukur dan penilai apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses pencatatan, sehingga Pengendalian Akuntansi berguna untuk menjamin bahwa langkah-langkah penyusunan dan pencatatan telah dilakukan. Sedangkan pada sistem pelaporan sangat di perlukan untuk memantau dan mengendalikan kinerja Instansi dalam

mengimplementasikan anggaran yang telah di tetapkan sebelumnya. Maka, untuk mencapai Akuntabilitas Kinerja Instansi yang baik suatu organisasi harus memperhatikan Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan.

Dari penelitian diatas menyatakan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jepara.

Hasil pengujian hipotesis didukunghasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Anjarwati (2012) yaitu Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di wilayah Tegal dan Pemalang, hal serupa juga di ungkapkan dalam penelitian yang dilakukan (Herawaty,2011) yaitu Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan secara simultan berpengaruh positif terhadap kehandalan struktur pengendalian intern.